

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-ted-



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C2-7104 HT.01.01.Th91. /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- : I. Surat permohonan tertanggal 6 September 1991 nomor 175/PT/IX/1991 dari Notaris Muhani Salim, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini ; /
- II. Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia 25 Juli 1991 nomor B-243/Pres/7/1991 ; /
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1991 nomor 45 Tahun 1991 ; /
- IV. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 Juli 1991 nomor 208/I/PMA/1991. /

-----

Menimbang

- : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

(000) 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Pada hari ini Kamis tel 05 DEC 1991  
akte ini telah didaftarkan di register untuk maksud itu  
ya g berada dikantor Jakarta Selatan  
dibawah No. 1193 JAK. SEL.  
1193  
Upah Telis Rp. 500  
0012422





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0133852  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SURVEYOR INDONESIA**

Kepada Yth.  
Notaris SURJADI S.H., M.KN., M.M., M.H.  
komp. harmoni plaza blok e 38-39 Lt.2, jL. suryopranoto  
No.2,  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 Tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris SURJADI S.H., M.KN., M.M., M.H., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SURVEYOR INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068927.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 April 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara